

ANALISIS YUDIRIS TENTANG PASAL 54 REHABILITASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Muhammad Rizky Aulia¹,Maksum², Afif Khalid³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810254

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1125086601

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1117048501

Email: koodeloverz21@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia saat ini telah sangat meresahkan bangsa Indonesia, tidak hanya dari kalangan yang berada, warga miskin - menengah, pegawai negeri atau swasta, tua - muda, bahkan anak sekolah. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, hal tersebut membuat para pelaku terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum serta menggunakan pendekatan per Undang-Undang dan pendekatan deskripsi konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pasal 103 Tentang Undang-Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika tidak sesuai pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yaitu para pecandu dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi yang dilakukan secara medis atau sosial. Kebijakan hukum yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pengertian politik yang mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang terdapat dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri. Adanya hukum tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau sebuah keharusan, akan tetapi dipandang sebagai subsistem yang kenyataannya tidak dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi beserta pasal-pasal dalam pelaksanaan dan penegakannya

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Narkotika, Undang Undang, Rehabilitasi.*

ABSTRACT

Indonesia Indonesia is currently very disturbing for the Indonesian people, not only among the rich, poor and middle class, civil servants or private employees, young and old, even school children. On the one hand, narcotics are drugs or substances that are useful in the field of medicine or health services and the development of natural sciences and on the other hand they can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without strict and careful control and supervision, this makes the perpetrators trapped. on narcotics abuse. The type of research used is normative legal research which is based on a process to discover legal rules, legal principles and legal doctrines and uses a statutory approach and a conceptual description approach. The research results show that based on article 103 concerning Laws The Narcotics Law states that judges who examine cases of narcotics addicts do not comply with article 54 Number 35 of 2009 concerning narcotics, namely that drug addicts and abusers are required to undergo medical or social rehabilitation. Legal policies that have been implemented nationally by the government include political understanding that influences the law by looking at the configuration of forces behind the making and enforcement of the law itself. The existence of law cannot be seen as articles that are imperative or a necessity, but is seen as a subsystem which in reality cannot be determined by politics, both in the formulation of the material and the articles in its implementation and enforcement.

Keywords: Narcotics Abuse, Law, Rehabilitation.

DAFTAR PUSTAKA

- 20 Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A.A. Istri Mas Candra Dewi.(2018) “*Perlindungan Hukum Terhadap[Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”. Jurnal Magister Ilmu Hukum
- Bayu Soelistyo Adjie,(2017). “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
- D. Soedjono, (2017) *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, :Karya Nusantara
- Intan Permata Sari Br Tarigan., Refli Singal., Ronny Sepang.,(2010) *Tinjauan Hukum Pernalan Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam Memberantas Pengguna Serta Pengedar Narkoba Di Wilayah Manado Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009*
- Humas BNN. (2023, Maret 15). “*BNN RI Buka Peluang Jalin Kerja Sama Dengan Mozambik*”. Retrieved from <https://bnn.go.id/bnn-ri-buka-peluang-jalin-kerja-sama-dengan/>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27.
- Shalih bin Ghanim As-Sadlan, (2000), *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta, Darul Haq dalam Op Cit Trisno Raharjo, 2002, hlm. 44-45
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, hlm.167.
- Siswanto S. , (2012), *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Syamsul Adhar,etc. “*Penegakan Hukum Tergadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3, No.3, hlm.804-805.
- Mardani,(2008) *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, jakarta Rafagrafindo Pustaka
- Otje Salman Dan Anton F. Susanto, (2004), *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. ,Bandung :Pt Refika Aditama
- Reki K. Koropit “*Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, *ejournal.unsrat*, Vol.VII, No.8,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.